

Implementation of ERP in AKIP Evaluation System: A Case Study at The Ministry of Maritime Affairs And Fisheries

Penerapan ERP pada Sistem Evaluasi AKIP: Studi Kasus pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Doni Wiryadinata¹, Eko Sedyono², Aris Puji Widodo³

¹ Magister Sistem Informasi, Universitas Diponegoro, Indonesia

² Ilmu Komputer, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

³ Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Indonesia

^{1*} doniwinata1281@students.undip.ac.id, ²eko@uksw.edu, ³arispw@gmail.com

*: *Penulis korespondensi (corresponding author)*

Article's Information / Informasi Artikel

Received: September 2022

Revised: September 2022

Accepted: October 2022

Published: October 2022

Abstract

Purpose: This study aims to determine the implementation of ERP in the evaluation of AKIP in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries including information technology infrastructure support, software design, and its implementation in the 2022 AKIP evaluation.

Design/methodology/approach: The research uses descriptive analysis methods and qualitative analysis with a case study approach. Descriptive analysis was conducted to provide an overview of the development of the e-AKIP application that applies the ERP concept, while qualitative analysis using a prospective case study approach was carried out to determine the current operational development of the e-AKIP application.

Findings/result: This study further confirms that ERP implementation in the government sector can provide added value and a positive influence on the implementation of organizational tasks and functions, by automating the implementation of AKIP implementation evaluations in digital form. The value test results in this application show a 100% accuracy rate compared to the LKE calculation in the excel application.

Originality/value/state of the art: In the AKIP evaluation method with ERP implementation using the latest LKE and carried out digitally at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries organization.

Abstrak

Keywords: one; two; three

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ERP dalam evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Kelautan

Kata kunci: *Enterprise System*,
ERP; Akuntabilitas Kinerja;
Evaluasi AKIP;

dan Perikanan meliputi dukungan infrastruktur teknologi informasi, perancangan perangkat lunak, dan implementasinya pada pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2022.

Perancangan/metode/pendekatan: Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan aplikasi e-AKIP yang menerapkan kerangka ERP, sedangkan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus prospektif (*Prospective Case Study*) dilakukan guna mengetahui perkembangan operasional aplikasi e-AKIP saat ini.

Hasil: Penelitian ini semakin menegaskan bahwa penerapan ERP di sektor pemerintahan dapat memberikan nilai tambah dan pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan mengotomatisasi pelaksanaan evaluasi implementasi AKIP ke dalam bentuk digital. Hasil uji nilai pada aplikasi ini menunjukkan tingkat akurasi 100% dibandingkan perhitungan LKE pada aplikasi *excel*.

Keaslian/ *state of the art*: Pada metode evaluasi AKIP dengan penerapan ERP menggunakan LKE terbaru (2021) dan dilaksanakan secara digital pada organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Pendahuluan

Reformasi Birokrasi di Indonesia terus bergulir memasuki fase ketiga 2020-2024. Pada masa ini pemerintah menargetkan tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima [1]. Salah satu area birokrasi yang menjadi fokus perubahan adalah akuntabilitas kinerja. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia telah dimulai sejak era reformasi melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP, hingga terakhir ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKIP. Melalui perangkat kebijakan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban dari setiap Instansi Pemerintahan untuk melaksanakan dan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyelenggaraan SAKIP di Indonesia dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). MENPAN RB terus berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman tentang implementasi SAKIP yang baik sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja pada sektor pemerintahan, sekaligus melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Hasil evaluasi SAKIP diumumkan kepada publik secara nasional setiap tahunnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada K/L atau Pemda merupakan sebuah kesempatan untuk memperbaiki mekanisme kinerja. Terdapat standar minimal yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah akuntabel dengan cara menyesuaikan kondisi organisasi dengan template Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang telah disiapkan oleh MENPAN RB. Adapun komponen yang menjadi penilaian SAKIP sesuai Peraturan MENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP,

terdiri atas: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Mekanisme evaluasi AKIP dikelompokkan dalam beberapa tahapan, yaitu pendokumentasian, analisis, interpretasi dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian Evaluasi AKIP, sedangkan metode evaluasi AKIP menggunakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Disamping melakukan penilaian langsung pada K/L dan Pemda, MENPAN RB memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L dan Pemda untuk melakukan evaluasi AKIP pada internal organisasi guna mewujudkan pengendalian internal yang lebih memadai pada instansi pemerintahan. Maka, MEMPAN RB memberikan template LKE untuk dapat digunakan dalam proses evaluasi. Dengan berpedoman kepada template LKE tersebut, maka APIP di seluruh K/L dan Pemda telah melaksanakan evaluasi AKIP sebagaimana mestinya, termasuk juga APIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet, APIP KKP melakukan inovasi teknologi dalam evaluasi AKIP, hal ini dikarenakan *tools* template LKE yang digunakan dari MENPAN RB berupa perangkat lunak (*file*) jenis microsoft excel yang telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan. Pada dasarnya, penggunaan *tools* ini tidak memiliki kendala teknis yang terkait dengan unsur validitas dan akurasi data dalam penilaian, namun kekurangannya adalah lebih kepada aspek teknis pelaksanaan evaluasi yang belum terintegrasi, kecepatan dalam memperoleh data evaluasi, serta proses analisis dan kompilasi hasil evaluasi pada sembilan unit eselon I merupakan pekerjaan yang tidak sederhana untuk mendapatkan nilai prediksi pada tingkat kementerian. Adanya keterbatasan *tools* penilaian tersebut, menjadi alasan bagi APIP KKP mengembangkan sistem aplikasi berbasis *website* yang memungkinkan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi AKIP (e-AKIP) dapat bekerja secara otomatisasi dan terstruktur dalam kerangka sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)*, sehingga dapat mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan kualitas hasil yang memuaskan.

Dengan informasi yang terdapat pada latar belakang diatas, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang bagaimana penerapan sistem ERP ke dalam pelaksanaan evaluasi AKIP pada organisasi KKP sekaligus menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Terdapat beberapa rumusan permasalahan yang mengemuka dalam penelitian ini, yaitu: (a) Bagaimana implementasi sistem ERP ke dalam proses bisnis evaluasi AKIP pada instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan; (b) Bagaimana teknik perancangan sistem aplikasi e-AKIP untuk memindahkan mekanisme evaluasi AKIP berbasis *offline* (*file excel*) ke dalam bentuk digital; (c) Bagaimana tingkat akurasi penilaian menggunakan sistem e-AKIP jika dibandingkan dengan menggunakan template LKE standar (*file excel*).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis **deskriptif** dilakukan untuk memberikan gambaran yang memadai tentang ERP yang diterapkan pada aplikasi e-AKIP meliputi dukungan infrastruktur teknologi

informasi, struktur basis data, perancangan perangkat lunak, pola integrasi dan analisis sistem yang digunakan, tim kerja evaluator yang terlibat di dalamnya, sedangkan analisis **kualitatif** dilakukan dengan pendekatan studi kasus prospektif (*Prospective Case Study*) agar penulis bisa mengetahui arah perkembangan dari penerapan sistem e-AKIP. Tindak lanjut dari studi kasus ini adalah diharapkan mendapatkan Penelitian Tindakan atau *Action Research* yang dilakukan oleh orang lain yang sudah ahli [2].

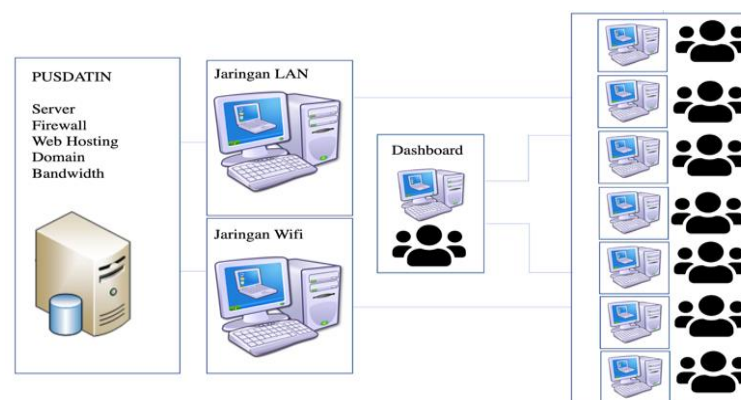
Menurut Nasution. S, dalam bukunya *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, 2019. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: (1) Observasi: berfungsi sebagai *explorasi* untuk memperoleh informasi tentang masalah yang sedang diselidiki; dan (8) Wawancara atau interview: adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi [3].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Pelaksanaan evaluasi AKIP di lingkungan KKP Tahun 2022 telah menerapkan ERP pada aplikasi e-AKIP. Perangkat teknologi ini baru pertama kali digunakan sebagai dampak perkembangan teknologi informasi pada organisasi ini. Ketika penulis melakukan eksplorasi lebih lanjut, diperoleh gambaran yang cukup menarik untuk dibahas pada penelitian ini.

- a. Rancangan Arsitektur e-AKIP. Penyediaan infrastuktur teknologi informasi berupa layanan *server*, *web hosting*, *bandwidth*, domain, SSL, dan jaringan internet disediakan dari Pusat Data Statistik dan Informasi (Pudsatin) KKP, sedangkan unit APIP bertanggung jawab terhadap pengembangan perangkat lunak aplikasi e-AKIP dan pengorganisasian sumber daya manusia (evaluator) pada kegiatan evaluasi AKIP. Proses evaluasi AKIP melibatkan unit organisasi eselon I seluruh KKP sebagai (evaluatan) pada saat evaluasi berlangsung. Dengan demikian, praktek pengembangan aplikasi e-AKIP telah sesuai dengan konsep ERP yang perkenalkan oleh Motiwalla, dkk. 2019. Berikut ini merupakan rancangan arsitektur e-AKIP sebagaimana diperlihatkan pada **Gambar 1** dibawah ini.



Gambar 1. Arsitektur Teknologi Informasi aplikasi e-AKIP KKP-RI

Pada Gambar 1 diatas mendeskripsikan adanya dukungan infrastruktur teknologi informasi (Server, Web Hosting, Bandwidth dan jaringan Local Area Network (LAN) dan jaringan wifi pada semua gedung perkantoran, perangkat lunak (Software) e-AKIP dikembangkan unit APIP KKP. Perangkat Lunak diantaranya terdapat Dashboard aplikasi e-AKIP untuk

- memonitor jalannya evaluasi yang sedang berlangsung, serta Tim Evaluator yang melaksanakan evaluasi AKIP pada unit Eselon I di lingkungan KKP secara *online*.
- b. Struktur Basis Data: Hasil evaluasi AKIP dipusatkan pada *databases* melalui mekanisme *input, proses* dan *output* data, dan dianalisis menggunakan perhitungan matematis, sehingga menggambarkan nilai hasil pengukuran pada *dashboard* e-AKIP. Basis data dikembangkan menggunakan MySql Phpmysql versi 7.4.12. *Data base* terdiri dari dua tabel utama, yaitu tabel evaluasi pada tingkat kementerian dan tabel evaluasi pada tingkat eselon I, dimana kedua tabel tersebut telah saling berkorelasi dan terintegrasi membentuk sebuah nilai kementerian dengan proporsi pembobotan nilai 50:50. Pembobotan nilai ini telah diatur demikian pada pedoman evaluasi AKIP di seluruh instansi pemerintahan.
 - c. Metode pengembangan perangkat lunak (*software*) pada aplikasi ini menggunakan metode *Agile Development* dengan pertimbangan bahwa perangkat teknologi ini tidak memerlukan *resources* yang besar serta dibutuhkan proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi berlangsung (*Usability Testing*). Perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan *Framework* PHP Laravel versi 5.7, sedangkan penerapan formulasi pada *dashboard* mengacu pada LKE standar evaluasi AKIP yang tertuang pada file excel kemudian dituangkan ke dalam bentuk digital.
 - d. Modul-modul evaluasi AKIP terdiri atas penilaian terhadap empat komponen AKIP, meliputi modul penilaian atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Modul evaluasi berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab secara *online* pada saat evaluasi berlangsung, dan setiap pertanyaan yang dijawab akan berpengaruh kepada nilai akuntabilitas kinerja kementerian secara *realtime*. Evaluasi dilaksanakan secara serentak pada sembilan unit eselon I di lingkungan KKP dan tingkat kementerian. Berikut diberikan contoh kasus perbandingan penilaian menggunakan *file excel* dengan penilaian menggunakan aplikasi e-AKIP pada salah satu komponen yang dievaluasi sebagaimana diperlihatkan pada **Gambar 2** dibawah ini.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	Jawaban	Nilai	Catatan	Daftar Evidence
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00			0		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00			Belum Disi		
1.a	Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.						
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.						
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.						
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.						
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.						
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.						
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyusunan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00			Belum Disi		
1.b	Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.						
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.						
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.						
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tugas/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.						
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.						
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable) - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).						
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.						
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).						
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/terang tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).						
10	Setiap unit/instansi telah memuat dan meniadakan Perencanaan Kinerja.						
11	Setiap pegawai memahami dan meniadakan Perencanaan Kinerja.						
1.a	Perencanaan Kinerja telah dimantapkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00			Belum Disi		
1.a	Kriteria:						
1	Anaoran yang ditetapkan telah menacu pada Kinerja yang ingin dicapai.						

Gambar 2. Template LKE Penilaian AKIP versi MENPAN RB

Pada **Gambar 2** di atas merupakan *tools excel* yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan terkait komponen AKIP dengan fokus pada keberadaan dokumen, kualitas dokumen dan pemanfaatannya pada organisasi, serta pemberian bobot nilai yang proporsional sampai pada masing-masing pertanyaan dengan akumulasi 100%. Pada tools ini, evaluator dituntut memberikan keputusan (*profesional adjudgement*) berupa simpulan hasil evaluasi secara kualitatif berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang ditemukan. Tata cara penilaian ini sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas *adjudgement* dan kompetensi seorang evaluator AKIP.

Sedangkan pada aplikasi e-AKIP memberikan fitur evaluasi yang bersifat kuantitatif dengan memberikan skoring pada setiap pertanyaan evaluasi dengan maksud agar penilaian menjadi lebih objektif dan juga untuk memudahkan evaluator dalam mengambil keputusan penilaian seperti pada **Gambar 3** berikut.

LEMBAR KRITERIA EVALUASI
 KOMPONEN: PERENCANAAN KINERJA

Bobot: 30,00 Capaian Bobot: 24,30

SUB KOMPONEN 1.A **KEBERADAAN PERENCANAAN KINERJA** Bobot: 6,00 Capaian: 6,00 (100,00%)

PERTANYAAN : Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia Nilai: 100,00 Status: AA Pilihan Nilai Save

No	Uraian Kondisi	Pilihan	Nilai	Eviden
1.	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada Permen KP 68/PERMEN-KP/2017 (100) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	view bukti
2.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	<input checked="" type="radio"/> Ya, Jika tersedia RPJPN (100) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	view bukti
3.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada Renstra (100) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	view bukti
4.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada Perjanjian Kinerja Pimpinan Instansi (100) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	view bukti
5.	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada Rencana Aksi (100) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	view bukti
6.	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada RKA (100) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	view bukti
7.	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada seluruh PK Level I (Unit Kerja) yang ditetapkan (100) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	view bukti

Simpan Perubahan

1. Pedoman teknis perencanaan telah tersedia yaitu berupa Permen KP No 68 tahun 2017 dan saat ini masih dalam proses revisi;
 2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang (RPJPN) UU No 17 Tahun 2007;
 3. Telah tersedia Renstra KKP Tahun 2020 - 2024 yang disahkan oleh Men KP melalui Permen KP Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 dan diubah dengan Permen KP No 57 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Perubahan atas Permen KP No 17 Tahun 2020 tentang Renstra KKP TA 2020-2024;
 4. Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek TA 2022 berupa Kepmen KP No 116 Tahun 2021 Tentang Renja KKP TA 2022;
 5. Terdapat Rencana Aksi yang telah di ttd Menteri KP per 15 Februari 2022;
 6. Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja TA 2022 berupa RKAKL;
 7. Telah terdapat PK level 1 yang telah dtttd oleh MenKP dan masing-masing Pejabat Eselon I.

SUB NILAI		700,00
CAPAIAN BOBOT (%)	AA	6,00
PROSENTASE CAPAIAN/BOBOT (%)	100,00	100,00

Gambar 3. Modul Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja Kementerian

Gambar 3 diatas merupakan modul penilaian keberadaan perencanaan kinerja pada tingkat kementerian, sedangkan pada tingkat eselon I dan unit kerja menggunakan modul penilaian tersendiri yang lebih kompleks. Modul-modul penilaian ini saling berelasi dan terintegrasi dalam satu data dan dianalisis menggunakan pembobotan untuk ditampilkan pada tabel *dashboard* penilaian pada tingkat kementerian. Pada bagian nilai (warna hijau) menyajikan skor untuk membantu evaluator dalam mengambil keputusan dalam pemberian nilai. Adapaun pilihan nilai

pada bagian atas menentukan besaran nilai yang diperoleh pada komponen perencanaan kinerja terdiri atas pilihan AA, A, BB, CC, C, D, dan E.

LEMBAR KRITERIA EVALUASI
KOMPONEN: PERENCANAAN KINERJA

Bobot: 30,00 Capaian Bobot: 24,30

SUB KOMPONEN 1.A KEBERADAAN PERENCANAAN KINERJA Bobot: 6,00 Capaian: 6,00 (100,00%)

PERTANYAAN : Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

No	Uraian Kondisi	Pilihan Nilai	Bobot	Capaian
1.	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada Permen KP 68/PERM <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	100,00
2.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	<input checked="" type="radio"/> Ya, Jika tersedia RPJPN (100%) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	100,00
3.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada Renstra (100%) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	100,00
4.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	<input checked="" type="radio"/> Ya, ada Perjanjian Kinerja Pimpinan Instansi (100%) <input type="radio"/> Tidak ada (0)	100,00	100,00

Pilihan Nilai

AA | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir

A | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir

BB | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan

B | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%)

CC | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%)

C | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%)

D | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%)

E | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Pilihan	Keterangan	Bobot
AA	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir	100%
A	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir	100%
BB	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan	100%
B	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi	>75% - 100%
CC	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi	>50% - 75%
D	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi	>0% - 25%
E	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja	0

Berikut merupakan modul evaluasi AKIP pada tingkat organisasi Eselon I dan sampel evaluasi pada 4 (empat) Unit Kerja. Pada prinsipnya algoritma evaluasi yang diterapkan sama dengan tingkat kementerian, namun memiliki input evaluasi yang lebih kompleks, seperti ditampilkan pada **Gambar 4** berikut:

SUB KOMPONEN 1.A | KEBERADAAN PERENCANAAN KINERJA

PERTANYAAN : Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia Bobot: 6,00

No	Uraian Kondisi	Unit 1	Nilai	Unit 2	Nilai	Unit 3	Nilai	Unit 4	Nilai	Eviden
1.	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	view bukti
2.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	view bukti
3.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	view bukti
4.	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	view bukti
5.	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	view bukti
6.	Setiap unit kerja level di bawahnya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	view bukti
7.	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	100,00	view bukti
SUB NILAI		<input checked="" type="radio"/> Submit	700,00	<input checked="" type="radio"/> Submit	700,00	<input checked="" type="radio"/> Submit	700,00	<input checked="" type="radio"/> Submit	700,00	
CAPAIAN BOBOT (%)		AA	6,00	AA	6,00	AA	6,00	AA	6,00	
PROSENTASE CAPAIANBOBOT (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Gambar 4. Modul Penilaian Kompoinen Perencanaan Kinerja Eselon I dan Unit Kerja

Hasil evaluasi pada level eselon I dan Unit Kerja menghasilkan nilai AKIP yang terakumulasi pada tingkat kementerian sebesar 50% : 50%. Dengan penerapan metode ini, menggambarkan adanya dampak positif bagi evaluator dalam proses pelaksanaan evaluasi dengan mempersingkat waktu pada saat kompilasi dan akumulasi nilai sebagaimana yang dilakukan pada LKE berbasis excel.

- e. Hasil analisis data dapat menggambarkan nilai prediksi pada tingkat kementerian dalam hal ini adalah KKP, dengan interpretasi yang diperoleh adalah mendapat predikat A yang berarti “MEMUASKAN”. Namun hasil ini masih bersifat prediktif karena pada akhirnya yang memberikan penilaian akhir atas implementasi AKIP KKP adalah MENPAN RB dengan teknis penilaiannya sendiri. Namun demikian, nilai prediktif ini dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi kelemahan Sistem AKIP yang sedang berjalan secara *realtime* dan unit kerja mana yang menjadi penyebabnya. berikut tampilan *dashboard* penilaian pada aplikasi e-AKIP seperti pada **Gambar 5**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Portofolio Nilai Akuntabilitas Kinerja									
			KKP	SETJEN	ITJEN	DJPT	DJPB	DJPDS	DJPRL	DJPSDKP	BRSDM	BKIPM
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	24.30	25.09	25.01	24.30	25.20	25.20	24.75	25.65	23.40	23.93
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	23.70	23.55	23.70	23.70	23.40	23.10	24.30	24.04	23.93	23.59
3.	PELAPORAN KINERJA	15	13.80	11.64	12.26	12.45	12.30	12.02	12.30	12.45	12.30	12.34
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	19.25	19.75	19.75	19.75	19.13	20.88	19.75	19.59	21.59	20.50
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100	81.05	80.63	80.73	80.20	80.03	81.19	81.10	81.73	81.22	80.35
MEMUASKAN			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Note: Tekan Button Update Data untuk memperbaharui status

Simulasi Nilai AKIP KKP 2022

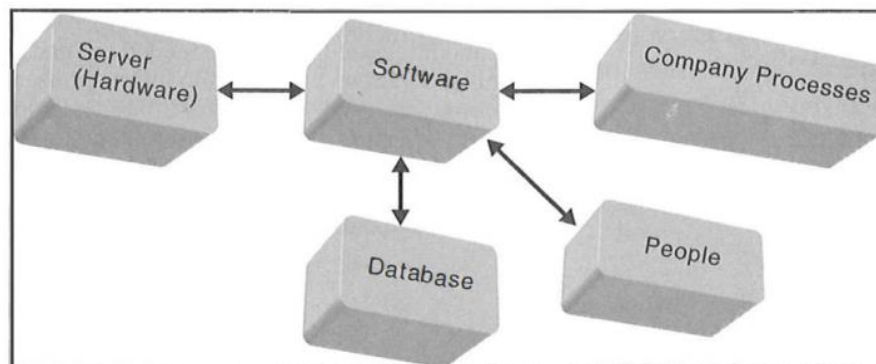
No	Komponen	Kementerian (Bobot 50%)	Unit Eselon I (Bobot 50%)								Nilai Unit (50%)	Total Nilai AKIP (100%)	
			Unit Utama				Unit Pendukung		Unit Tambahan				
			DJPT	DJPB	DJPDS	DJPRL	SETJEN	ITJEN	BRSDM	DJPSDKP			BKIPM
1.	PERENCANAAN KINERJA	12.15	1.35	1.40	1.40	1.38	1.39	1.39	1.30	1.43	1.33	12.36	24.51
2.	PENGUKURAN KINERJA	11.85	1.32	1.30	1.28	1.35	1.31	1.32	1.33	1.34	1.31	11.85	23.70
3.	PELAPORAN KINERJA	6.90	0.69	0.68	0.67	0.68	0.65	0.68	0.68	0.69	0.69	6.11	13.01
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	9.63	1.10	1.06	1.16	1.10	1.10	1.10	1.20	1.09	1.14	10.04	19.66
TOTAL NILAI AKIP		40.53	4.46	4.45	4.51	4.51	4.45	4.48	4.51	4.54	4.46	40.36	80.88

Gambar 5. Dashboard Informasi Nilai AKIP Tingkat KKP

- Gambar 5.** diatas menunjukkan hasil penilaian mandiri oleh evaluator pada tingkat kementerian mendapat 81,05 diikuti oleh unit organisasi Eselon I lainnya, namun jika diintegrasikan dengan perbandingan bobot 50:50 berarti tingkat KKP **berpengaruh** 50% terhadap nilai, sedangkan 50% sisa bobot dipengaruhi oleh akumulasi penilaian dari unit kerja Eselon I. Dari hasil evaluasi menggunakan pembobotan tersebut, diperoleh nilai tingkat pusat 40,53% dan rata-sata unit 40,36% sehingga nilai KKP bisa diprediksi mendapat nilai 80.88 atau A (Memuaskan).
- f. Dari hasil reuiu terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP KKP Tahun 2022 yang disampaikan KKP kepada MENPAN RB menunjukkan hasil penilaian yang sesuai dengan aplikasi e-AKIP yaitu 80,88 atau A (Memuaskan) [4]. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi e-AKIP telah berhasil diterapkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menilai akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian.
- g. Hasil pengujian validitas pada aplikasi e-AKIP dengan cara membandingkannya dengan perhitungan yang sama pada template LKE AKIP yang diterbitkan oleh MENPAN RB melalui aplikasi excel diperoleh tingkat akurasi 100% atau nilai sama persis dengan perhitungan pada aplikasi excel, sedangkan pengujian reabilitas penilaian terhadap semua objek eselon I yang dinilai menunjukkan hasil penilaian yang konsiten.
- h. Disamping mendapatkan hasil yang penilaian yang positif diatas, dengan adanya sistem aplikasi ini menciptakan suasana dan budaya kerja baru antar Tim Evaluasi yang lebih transparan, komprehensif, dan lebih profesional dari sudut pandang organisasi Eselon I yang di evaluasi. Penyajian nilai secara *realtime* telah memberikan dampak positif bagi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja yang lebih tersistematis dan terukur

3.2. Sitasi dan Referensi

Enterprise Resource Planning (ERP) atau Perencanaan Sumber Daya Perusahaan merupakan suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis penting. Sistem ERP memiliki lima komponen dasar, yaitu Perangkat Lunak (*Software*), Perangkat Keras (*Hardware*), Basis Data (*Database*), Bisnis Proses Perusahaan/Organisasi (*Company Processes*), dan Orang-orang yang menggerakkan (*People*). Komponen ERP saling melengkapi dan terintegrasi menjadi sebuah kesatuan sistem [5] seperti pada **Gambar 6** berikut:



Gambar 6. Komponen Dasar ERP

Mengutip Davenport, 1998, dalam buku yang ditulis oleh Peter Ekman, 2016, berjudul *Enterprise System & Business Relationship: The Utilization of it in the Business with Customers and Supplier*, mendefinisikan Sistem Enterprise sebagai sistem informasi kompleks yang menawarkan kemampuan kepada organisasi untuk mendukung kegiatan bisnis dan mengintegrasikan semua transaksi data mereka, membuat kegiatan bisnis mereka lebih transparan dan melepaskan mereka dari sistem warisan [6].

Ada banyak fungsi sistem ERP yang dapat digunakan organisasi. Dengan implementasi yang tepat, maka proses bisnis dapat berjalan lebih efisien. Berikut fungsi sistem ERP : (1) integrasi antar departemen; (2) meningkatkan akurasi proses bisnis; dan (3) memudahkan dalam melakukan monitoring. Penggunaan sistem ERP pun bersifat modular. Sehingga, dalam penerapan sistem ERP akan sangat fleksibel. Perusahaan tinggal memilih modul yang dibutuhkan saja. Sistem ERP bisa digunakan untuk berbagai jenis perusahaan, mulai dari perusahaan jasa, manufaktur, hingga perdagangan. [7].

Software ERP banyak disediakan oleh *outsourcing* selaku vendor ERP antara lain Oracle, SAP (*Systemanalyse und Programmentwicklung*), Baan, J.D. Edwards, IFS (*Industrial and Financial System*), Peoplesoft dan lain-lain. Menurut Motiwalla, dkk, Pemilihan perangkat lunak ERP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) memilih vendor yang sesuai serta mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka panjang merupakan langkah awal yang penting untuk kesuksesan implementasi sistem ERP; (b) dalam pemilihan vendor, proses seleksi perlu dipahami dan dilaksanakan dengan baik; (c) perusahaan dapat menyewa perusahaan konsultan khusus untuk membantu proses seleksi vendor jika diperlukan; dan (d) langkah-langkah yang diperlukan dalam memilih vendor pada umumnya didasarkan pada kesesuaian fungsi bisnis dan kinerja produk vendor ERP secara keseluruhan di pasaran.

Selain banyak diterapkan di berbagai perusahaan, Sistem ERP telah banyak diterapkan pada sektor pemerintahan, antara lain aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang dikembangkan Kementerian Keuangan. Aplikasi SAKTI digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dalam melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran [7]. Menurut pada akademisi, ERP bisa diterapkan pada organisasi sektor publik, sehingga banyak menjadi topik penelitian mereka, diantaranya adalah Ismutadi, Pandu, 2010. meneliti tentang penerapan ERP pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dengan menggunakan *Open ERP* menyimpulkan bahwa proses bisnis Inspektorat Jenderal dapat diintegrasikan dan diotomatisasikan, antara lain pada proses pengadaan barang/jasa terutama barang habis pakai, manajemen dapat secara *realtime* mengetahui posisi stok di gudang, sehingga apabila ada kebutuhan dapat langsung diambil keputusan bahwa barang tersebut diambil dari gudang atau harus melalui proses pengadaan [8].

Dalam studi kasus di negara lain, contohnya Malaysia, juga membuktikan bahwa dampak implementasi ERP dalam konteks otoritas lokal di sektor publik Malaysia telah menjadi salah satu strategi yang efisien dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja sektor publik. Hal ini dikatakan oleh Fernandez, dahlia, dkk; dalam Jurnal mereka yang mengambil tema tentang “Dampak sistem ERP pada organisasi sektor publik: studi kasus pada pemerintahan Malaysia” [9].

Implementasi ERP merupakan sebuah inisiasi dan strategi. Hal ini dikatakan oleh Anton Susanto dalam Jurnalnya berjudul Implementasi Sistem ERP pada PT. Pos Indonesia: Sebuah Inisiasi dan Strategi, menyebutkan bahwa salah satu faktor unit organisasi menerapkan ERP adalah kebutuhan terhadap informasi yang bersifat *realtime* dan kebutuhan terhadap peningkatan efisiensi dan kinerja agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi organisasi. [10]. Selanjutnya, Setyawan Wibisono, 2005, mengungkapkan dalam Jurnalnya bahwa ERP merupakan solusi sistem informasi terintegrasi yang memiliki modul-modul untuk kebutuhan organisasi mulai dari keuangan dan distribusi. Penggunaan ERP menjadikan semua sistem dalam suatu organisasi menjadi satu data terintegrasi dalam database, sehingga antar departemen menjadi lebih mudah berbagi data dan berkomunikasi [11]

Dengan adanya berbagai sumber informasi diatas menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana ERP bisa diterapkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan. Pengukuran akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintahan telah berkembang menggunakan metode penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Metode pengukuran kinerja model ini dikembangkan oleh MENPAN RB dalam menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara nasional [12]. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah [13].

Untuk mengukur penyelenggaraan SAKIP, metode evaluasi yang digunakan diatur pada Peraturan MENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merevisi peraturan sebelumnya yaitu Peraturan MENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015. Mekanisme evaluasi mengatur tentang aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang

ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun komponen evaluasi yang menjadi cakupan dalam evaluasi tersaji pada **Gambar 7** berikut.

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Gambar 7. Komponen Evaluasi AKIP dan Pembobotan Nilai

Pada gambar diatas menjelaskan komponen penilaian AKIP yang terbagi dalam empat (4) komponen utama, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja (Bobot: 30%); (2) Pengukuran Kinerja (Bobot: 30%); (3) Pelaporan Kinerja (Bobot: 15%); dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot: 25%). Di dalam komponen utama, terdapat sub-komponen yang juga memiliki bobot masing-masing, yaitu: Keberadaan (Bobot: 20%); Kualitas (Bobot: 30%); dan Pemanfaatan: (Bobot: 25%). Hal ini menjadi dasar yang digunakan dalam mengevaluasi AKIP bagi seluruh organisasi pemerintahan.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja. Langkah-langkah dalam evaluasi AKIP dituangkan pada LKE.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Dalam kajian berbagai literatur dan jurnal yang terkait dengan evaluasi atas implementasi AKIP pada tingkat K/L dan Pemda, diketahui bahwa pendekatan penelitian yang digunakan masih menggunakan Peraturan MENPAN RB Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [13], sedangkan peraturan tersebut telah diperbaharui/diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini mempertegas kebaruan dari penelitian ini dan ditambah dengan adanya inovasi eknologi informasi dalam

penilaian semakin menguatkan adanya mekanisme terbaru dalam penilaian implementasi AKIP di Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa penerapan ERP pada sektor pemerintahan dapat memberikan manfaat nilai tambah dan pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam kasus ini unit APIP KKP telah berhasil mengembangkan metode evaluasi atas implementasi AKIP terbaru yang dikeluarkan oleh MENPAN RB Tahun 2021 ke dalam bentuk digital menggunakan *Framework* Laravel berbasis ERP. Hasil pengujian nilai pada aplikasi ini menunjukkan tingkat keakurasian sebesar 100% dibandingkan dengan perhitungan LKE pada aplikasi excel sedangkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan hasil yang relatif konsisten. Disamping mendapatkan hasil penilaian yang akurat, penerapan aplikasi ini telah mendapatkan respon yang positif dari pengguna baik evaluator maupun evaluatan.

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyarankan kepada unit APIP KKP supaya dapat mengembangkan metode evaluasi ini secara lebih massif dalam organisasi pemerintahan, serta untuk menjadi bahan referensi kepada para akademisi dalam mengembangkan metode tersebut dalam penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- [1] Pemerintah Indonesia, Kementerian PAN RB, 2020, Roadmap Reformasi Birokrasi Indoneasia 2020-2024, Jakarta, Indonesia.
- [2] Rahardjo, Mudjia. (pp.6), Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, 2021, Malang, Jawa Timur.
- [3] Nasution. (pp.6), Metode Research (Penelitian Ilmiah), 2019, Jakarta, Indonesia.
- [4] Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ikhtisar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2021, KKP, Jakarta
- [5] Motiwalla, Luvai. F. & Thomson, Jeff. (2009), Enterprise System for Management (pp. 12-13). Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458.
- [6] Ekman, Peter. (2006), & Bussiness Relationship: The Utilization of it in the Bussiness with Customers and Supplier. School of Bussiness Malardalen University, Vasteras, Swedia.
- [7] Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi UNIDA Bogor, 2021, pada laman url: <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/pengertian-sistem-erp-dan-fungsinya-bagi-perusahaan.html>, Universitas Djuanda, Bogor Indonesia.
- [8] Sulistiyono, Faried Zamachsari (Dit. SITP), Leila Rizki Niwanda. (2019). SAKTI, Wujud Inovasi Pengelolaan Keuangan Negara. Treasury Indonesia, Kementerian Keuangan, Jakarta Indonesia.
- [9] Ismutadi, Pandu. (2010). Uji Coba Enterprise Resource Planning Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dengan Menggunakan Opensource, (pp.

87). Jakarta.

- [10] Fernandez, Dahlia. (2016). Dampak sistem ERP pada organisasi sektor publik: studi kasus pada pemerintahan Malaysia, (pp. 35). 8th International Conference on Advances in Information Technology, IAIT2016, 19-22, Desember 2016, Macau, China.
- [11] Susanto, Anton. (2013). Implementasi Sistem ERP (Enterprise Resource Planning) PT. Pos Indonesia: Sebuah Inisiasi dan Strategi, December 2013, Kementerian Kominfo, Jakarta Indonesia.
- [12] Wibisono, Setyawan. (2005). Enterprise Resource Planning (ERP) Solusi Sistem Informasi Terintegrasi, September 2005, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank, Semarang Indonesia.
- [13] Pemerintah Indonesia. (2021), Peraturan MENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2021, Jakarta, Indonesia.
- [14] Pemerintah Indonesia. (2021), Peraturan MENPAN RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014, Jakarta, Indonesia.
- [15] Pemerintah Indonesia. (2015), Peraturan MENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2015, Jakarta, Indonesia.

